



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	7

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bahas THL, DPRD Hearing dengan Bupati Dewan: Solusi yang Ditawarkan Bisa Menjadi Obat



Bupati Pasbar, Hamsuardi, wakil ketua DPRD Pasbar, Endra Yama Putra, Ketua Komisi I Rosdi, duduk bersama saat menggelar Hearing tentang THL.

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), gelar dengar pendapat dengan Bupati Pasbar Hamsuardi dan kepala OPD terkait pembahasan kelanjutan Tenaga Harian Lepas (THL) setelah di rumahkan di kantor dewan Padang Tuhuh, Senin (7/6). Selain kepala OPD, hadir dalam dengar pendapat tersebut ketua komisi untuk mencari jalan keluar di tengah pandemi Covid-19 yang semakin mengganang dan menyedot anggaran.

Wakil Ketua DPRD Pasbar Daliyus K yang memimpin sidang dengar pendapat tersebut bersama Wakil Ketua Endra Yama Putra mengatakan, jika apa yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI. Selain itu, THL sudah melebihi kapasitas dari beban kerja.

Tenaga kerja kita sudah terlalu gemuk di Pemda hingga ada indikasi temuan dari BPK. BPK merekomendasikan kepada Pemda untuk menganalisa jabatan di seluruh OPD. Namun, terlepas dari itu semua kita harus memikirkan juga bagaimana nasib THL ini ke depan," kata Daliyus K.

Selain itu, semenjak dari 2019 lalu APBD Pasbar selalu mengalami penurunan, begitu juga tahun 2020 hingga tahun ini. Sebagai wakil rakyat Ia meminta kepada bupati untuk secepatnya memanggil THL yang memiliki kemampuan atau skill, yang sudah lama bertugas, hingga disiplin.

Kami harapkan kepada bupati untuk memberikan kepastian kepada THL yang sudah kami usulkan

tadi. Jumlah THL yang sudah di SK itu sekitar 3.042 termasuk guru, administrasi, hingga tenaga kesehatan. Diperkirakan yang dirumahkan tidak lebih dari 64 persen. Artinya 65 persen itu masih digunakan oleh Pemda Pasbar untuk kelancaran jalannya pemerintahan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki," kata Daliyus.

Sementara itu, Bupati Pasbar Hamsuardi mengatakan, dengar pendapat dengan dewan untuk mencari jalan terbaik ketika mengambil kebijakan. Karena pemerintah mengambil kebijakan tidak akan tanpa pertimbangan, apalagi saat di tengah pandemi Covid-19.

Kita merumahkan THL itu atas rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI karena sudah kelebihan kapasitas. Namun, kita tidak seluruhnya merumahkan mereka. Tenaga kesehatan, guru, sopir, Sespri, petugas kebersihan, Satpol PP yang bertugas dalam pengamanan, dan pemadam kebakaran masih berdinamika dan tenaga teknis lainnya masih bertugas. Kita melakukan semua itu sesuai juga dengan analisa jabatan, fungsi jabatan. Kita juga minta kepala OPD untuk menganalisis itu ke depan," ujar Hamsuardi.

Menurut bupati ada masukan-masukan dewan yang disampaikan dalam dengar pendapat tersebut seperti mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki oleh THL, lama bertugas, serta disiplin dalam bekerja. "Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita di dewan akan kita pertimbangkan," ucap Hamsuardi. (end)